

**PERAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM  
MEWUJUDKAN INFORMASI YANG BERETIKA DAN BERTANGGUNG  
JAWAB DI PROVINSI RIAU**

**Oleh : Jhon Carlos Purba**  
Email : jhoncarlospurba@gmail.com

Pembimbing : **Zulkarnaini, S.Sos, M.Si**  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-  
Telp/Fax. 0761-63277

**Abstract**

*The high rate offense in using social media and least of the knowledge of the society about the information that have ethics and responsibility make some problems in the information and communication aspect. In this case, The Official of Communication and informatics in Riau Province, have a role to create the information that have ethics and responsibility. Based on that case, researcher want to hold the research about The Role of the Official Communication and Informatics to Create the Information that have ethics and responsibility in Riau Province. This research aims to know The Role of the Official Communication and Informatics to Create the Information that have ethics and responsibility in Riau Province and the factors that effect The Role of the Official Communication and Informatics to Create the Information that have ethics and responsibility in Riau Province.*

*This research using the concept of Role Theory, which explain some indicators such as informant, facilitator, and Mediator. This research using the Qualitative Approach with Collecting Data Techniques of interview, observation and documentation. This research informan is the Head of Public Information at The Official of Communication and informatics, The Employees in field of Public information and society.*

*Based on the research, it can be known that The Role of the Official Communication and Informatics to Create the Information that have ethics and responsibility in Riau Province still not maximum. And the factors that affect is Communication, resources and means and also the funds and budget.*

*Keyword: Role, Communication Ethics, and Organization Development*

**A. PENDAHULUAN**

Era Globalisasi merupakan suatu era yang menuntut sebuah perubahan yang begitu besar dan

memiliki efek secara mendunia, salah satu efek dari Globalisasi adalah berkembangnya komunikasi dan informasi. Perkembangan informasi di Indonesia sampai

dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang informasi dan Komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif). Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia selalu mengadaptasi berbagai teknologi informasi hingga akhirnya tiba di suatu masa di mana penggunaan internet mulai menjadi makanan sehari-hari yang dikenal dengan teknologi berbasis internet (*internet based technology*).

Berdasarkan laporan Southeast Asia Freedom Of Expression Network, terjadi kenaikan pelaporan kasus di tahun 2014 hingga 2015. Sekitar 53 persen (41 kasus menjadi 72 kasus) terjadi di tahun 2015. Angka rata-rata kasus UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) sampai Oktober 2015 menunjukkan bahwa terdapat empat kasus yang dilaporkan per bulan. Berdasarkan Gender, sebanyak 77 persen (60 orang) dari kasus tersebut dilakukan oleh laki-laki sedangkan sisanya sebesar 23 persen (18 orang) oleh wanita. Sedangkan berdasarkan profesi masyarakat awam (bukan pejabat) paling banyak mencatatkan kasus yakni sekitar 45 persen (35 kasus). Sebesar 37 persen (29 kasus) dilakukan oleh pejabat publik dan

sisanya 13 persen (11 kasus) dilakukan oleh kalangan profesi.

Berdasarkan data Kementrian Informasi dan Komunikasi (KOMINFO) Sampai saat ini Indonesia menempati peringkat ke-6 didunia sebagai pengguna media komunikasi dan informasi yang berbasis internet terutama pada media sosial.

Di Provinsi Riau sendiri perkembangan komunikasi dan informasi berkembang cukup pesat, berdasarkan data KOMINFO, Riau berada di peringkat tiga di pulau sumatera dengan jumlah pengguna sekitar 5.000.000 orang pengguna media komunikasi dan informasi, membuat Provinsi Riau menjadikan media komunikasi dan informasi menjadi sebuah kebutuhan untuk masyarakat.

Organisasi yang di percaya sebagai pengelola komunikasi dan teknologi informasi di Provinsi Riau adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang juga berperan sebagai pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi dengan berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi sehingga dapat menjadi pusat informasi bagi kebutuhan pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Diskominfo Memiliki Visi Komunikasi dan Informatika yang merupakan Visi Dinas yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Dinas Komunikasi

dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya. Rumusan Visi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya Visi Pemerintahan Provinsi Riau tahun 2014-2019 yaitu : “Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja Serta Pemantapan Aparatur”.

Dalam program yang sudah dilakukan sejauh ini DISKOMINFO sendiri dalam upaya mewujudkan misinya baru merealisasikan 1 program saja yaitu pelatihan bidang SDM komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkan hal Diskominfo belum cukup maksimal dalam Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab, ini terlihat dari masih minimnya realisasi program yang sudah direncanakan dalam mewujudkan misi tersebut sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan media komunikasi dan informasi sehingga terjadi kebebasan yang tidak terkontrol yang memicu beberapa pelanggaran etika dalam informasi. berdasarkan Fenomena di atas, maka penulis tertarik meneliti peran dari Diskominfo Provinsi Riau dengan Judul: “**Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Mewujudkan Informasi yang Beretika dan Bertanggung Jawab di Provinsi Riau**”.

## Konsep Teori

### 1. Pengembangan Organisasi

Menurut Huse dan Cummings dalam **Thoha (2002:9)** mengemukakan bahwa Pengembangan Organisasi (*Organizational Development*) merupakan sistem yang menyeluruh yang berusaha menerapkan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan pengembangan jangka panjang. Cara ini ditujukan untuk mengembangkan strategi, struktur, dan proses sehingga dicapai efektivitas organisasi.

Konsep pengertian seperti ini menekankan beberapa hal yang dapat membedakan antara pembinaan organisasi dan kegiatan pengembangan organisasi lainnya. Hal-hal itu antara lain :

- a. Pembinaan organisasi dapat dipakai untuk seluruh sistem organisasi secara keseluruhan, misalnya untuk seluruh bagian dalam suatu departemen sebagai suatu sistem atau suatu unit sebagai suatu sistem dalam unit tersebut dan atau dalam suatu kelompok orang-orang tertentu
- b. Pembinaan organisasi diamalkan berdasarkan ilmu pengetahuan perilaku, termasuk didalamnya konsep mikro seperti kepemimpinan, dinamika kelompok dan perencanaan kerja, dan konsep makro misalnya seperti strategi organisasi, struktur organisasi dan hubungan antara organisasi dan lingkungannya. Pembinaan

organisasi selain menekankan aspek rasionalitas dan teknis juga sangat memperhatikan hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial lainnya.

- c. Pembaharuan, perubahan dan penyempurnaan yang dikenal oleh pembinaan organisasi itu secara formal bukan hanya diterapkan pada perencanaan bisnis. Akan tetapi pembinaan organisasi melibatkan sesuatu perencanaan yang mendiagnosa dan memecahkan suatu persoalan organisasi, dan perencanaan ini sangat lentur dan seringkali diperbaiki manakala informasi baru terkumpulkan dan mengharuskan adanya perubahan.
- d. Pembinaan organisasi adalah kreasi dan konsekuensi dari perubahan itu sendiri. Usaha ini bergerak mulai dari memberikan perhatian terhadap pelaksanaan perubahan itu sendiri sampai dengan program jangka panjang menstabilkan dan melembagakan perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan didalam organisasi.
- e. Pembinaan organisasi meliputi struktur, strategi, dan proses pembaharuan, perubahan dan penyempurnaan.
- f. Pembinaan organisasi berorientasi untuk penyempurnaan efektivitas organisasi. Orientasi ini meliputi dua hal yaitu: pertama, suatu organisasi yang efektif ini harus mampu memecahkan persoalannya

sendiri, dan yang kedua, harus mampu menunjukkan kualitas kerja dan produktivitas yang tinggi.

Menurut **Siagian (2012:3)** pengembangan organisasi dikatakan sebagai instrument ilmiah dalam meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi karena pengembangan organisasi mengandung unsur-unsur :

- a. Terencana
- b. Mencakup seluruh organisasi
- c. Berdampak jangka panjang
- d. Melibatkan manajemen puncak
- e. Menggunakan berbagai bentuk intervensi berdasarkan pendekatan berperilaku.

## 2. Peranan Organisasi

Peran Instansi dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh **Siagian (2000: 142-150)** yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan

selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif., melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi,

sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

### 3. Etika Komunikasi

Menurut Haryatmoko (2007) Ada tiga pertimbangan mengapa perlu penerapan etika komunikasi:

- a. Media mempunyai kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik. Media mudah memanipulasi dan mengalienasi khalayak. Dengan demikian etika komunikasi mau melindungi publik yang lemah.
- b. Etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab.
- c. Mencoba menghindari sedapat mungkin, dampak negatif dari logika instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna, yang penting adalah mempertahankan kredibilitas pers di depan publik, tujuan media sebagai instrumen pencerahan kurang mendapat perhatian.

Dalam menyampaikan informasi, peranan media massa sangatlah berpengaruh. Pemberitaan media massa yang berisikan tuntutan, protes dan dukungan dari masyarakat, seringkali menyebabkan efek yang besar terhadap lingkungan masyarakat dan kebijakan yang akan diambil. Misalnya, demonstrasi anarkis yang selalu ditayangkan berulang-ulang di stasiun televisi, dapat menyebabkan orang takut dan trauma. Begitu juga tuntutan yang disertai kata-kata yang kasar, dapat

membuat orang benci dan tidak simpati.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Diskominfo Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah dengan memperhitungkan aksesibilitas, dimana lokasi penelitian mudah untuk dijangkau oleh peneliti, karena dibutuhkan waktu beberapa kali untuk melakukan penelitian. Selain itu fenomena yang diteliti masih terjadi (berlangsung).

### 3. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang diteliti. Data atau informasi yang diteliti harus ditelusuri seluas-luasnya (sedalam mungkin) agar

peneliti mampu mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara utuh, maka didalam penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara menggunakan teknik snowball *sampling* yaitu suatu teknik penarikan informan yang menyerupai pembuatan bola salju, yaitu semakin lama menggelinging semakin besar. Dimulai dengan jumlah yang sedikit dan akhirnya menjadi banyak. Pertama, menentukan beberapa informan yang dianggap mengerti tentang masalah yang ingin diteliti, selanjutnya dari beberapa informan yang ada akan memberikan petunjuk informan selanjutnya untuk diwawancarai ataupun observasi, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
- b. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau (1 Orang)
- c. Masyarakat (2 Orang)

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah tatacara atau tehnik pencarian data, baik yang berasal dari sumber atau objek penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Teknik Kepustakaan
- d. Dokumentasi

#### **6. Analisa Data**

Untuk lebih meningkatkan tingkat kepercayaan dan devaliditas terhadap data penelitian ini penulis melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Penulis mengambil teknik triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. **Nasution (2003:115)** berpandangan triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Mewujudkan Informasi Yang Beretika dan Bertanggung Jawab**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2

Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah penelitian dalam latar belakang masalah yaitu Bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Mewujudkan Informasi yang bertanggung jawab. Pada bagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung.

Dengan demikian keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang bertanggung jawab akan berimplikasi pada keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Dinas yang berperan dalam mewujudkan informasi yang bertanggung jawab sesuai dengan Misi Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

Oleh karena itu untuk melihat bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan Informasi yang bertanggung jawab pada uraian berikut dapat dijelaskan.

a. Informan

Berperan Sebagai Informan adapun yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Melalui Bidang Informasi Publik adalah Sosialisasi Tentang Informasi yang beretika dan bertanggung jawab.

b. Fasilitator

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang berperan sebagai fasilitator sudah cukup efektif dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau telah melakukan fasilitasi terhadap pegawai atau aparatur juga masyarakat melalui beberapa pelatihan dan diklat juga berperan aktif dalam mencegah tersebarnya berita atau informasi yang tidak beretika dan bertanggung jawab dengan melakukan pemblokiran dan teguran kepada pihak yang menyebarkan informasi.

c. Mediator

Dari wawancara yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa Dinas komunikasi berperan sebagai media yang menengahi beberapa masalah informasi dengan tujuan jika terjadi permasalahan agar dapat mengklarifikasi masalah tersebut sebelum di proses ke pihak yang berwajib.

**B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam Mewujudkan Informasi yang Bertika dan Bertanggung Jawab di Provinsi Riau**

Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam mewujudkan Informasi yang bertika dan bertanggung jawab masih ditemui beberapa kendala yang menyebabkan untuk mewujudkan informasi yang bertika dan bertanggung jawab tersebut terhambat dan kurang optimal. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah di jelaskan penulis akan mengemukakan faktor faktor yang menghambat peran Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Riau dalam mewujudkan Informasi yang bertika dan bertanggung jawab di provinsi Riau.

a. Komunikasi

Dari wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa komunikasi yang kurang baik terjadi dalam sosialisasi ini ditandai dengan kurang meratanya atau masih ada masyarakat yang tidak paham tentang sosialisasi tersebut disini terlihat Dinas Komunikasi dan Informatika hanya terfokus pada pihak insstansi atau sekolah saja dalam mengkomunikasikan sosialisasi informasi yang bertika dan bertanggung jawab namun kepada masyarakat umum sangat kurang.

b. Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendukung

Dari Kutipan wawancara yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan informasi yang bertika dan bertanggung jawab di Provinsi Riau.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan PDE Provinsi Riau disajikan tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1: Sarana Informasi Layanan Publik**

No	Uraian	Jlh
1	Digital Signage (Anjungan Informasi)	2
2	Media Center	2
3	Mobil PLIK	2
4	Mobil Unit Penyebarluasan Informasi	1
5	Newsroom	1
6	Ruang PPID	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari wawancara wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki keterbatasan dari segi jumlah dalam sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

Tanpa sarana dan prasarana yang lengkap Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengakibatkan

terhambatnya tujuan dalam mewujudkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab sehingga akan tetap terjadi peningkatan kasus pelanggaran informasi yang beretika dan bertanggung jawab.

c. Dana dan Anggaran

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan kegiatan yang hendak dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhambat atau terkendala oleh pengelolaan anggaran. Anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika di rasa kurang cukup untuk mengembangkan setiap program yang ada.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Dinas komunikasi dan Informatika provinsi riau dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di provinsi Riau sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya belum merata dengan dimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau telah melakukan beberapa program dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab seperti Edukasi Internet sehat dan

cakap, Stop bullying, Pelatihan kepada pegawai hingga melakukan teguran dan pemblokiran terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari dari peran dinas komunikasi dan informatika provinsi riau dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di provinsi riau di temukan beberapa faktor yang mempengaruhi peran tersebut yaitu ;

#### **B. Saran**

1. Memberikan sosialisasi dengan baik dan kepada seluruh masyarakat tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan Informasi yang beretika dan bertanggung jawab di provinsi riau. Dan mensosialisasikan tentang dampak atas penyalahgunaan informasi yang dapat merusak keranah hukum dan dapat ditindak pidana.
2. Dari faktor-faktor yang sudah dijelaskan mengenai peran dinas komunikasi dan informatika dalam mewujudkan informasi yang beretika dan bertanggung jawab di Provinsi Riau, peneliti memberi saran :

- a. Untuk menjamin tidak terjadinya miskomunikasi maka pihak dinas harus mensosialisasikan dengan baik dan mengikutsertakan masyarakat dan dapat juga menggunakan metode dialog agar terjadi keefektifan antara apa yang penyampai dan penerima.
- b. Melatih dan penambahan sumberdaya manusia atau pegawai agar menjamin keefektifan dalam melaksanakan kebijakan tanpa hambatan
- c. Melakukan rencana program sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan agar tidak ada program yang tidak berjalan akibat anggaran atau dana yang cukup.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Ali, Muhammad. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali pers.
- Alwi, Hasan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Berry, David. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daryanto, SS. 1998. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., and Donnelly, Jr, James H. (1997). *Organization, Terj. Nunuk Ardiani, Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses, Edisi 8*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasandan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jati, Sutopo Putria MM. 2000. *Makalah Dasar-Dasar Organisasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Johansen, Richard L. 1996. *Ethics in Human Communication. Prospect Heights, III*. Waveland Press.
- Komarudin. 1994, *Ensiklopedia Management*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kreitner dan Kinicki. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transpormasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mitra Ariadi, 2010. *Efektifitas Program pada Organisasi*

*Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau, Pekanbaru*

- Mulyasa. 2002. *Manajemen Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Organisasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Robbins, Stephen. P . 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi: Alih Bahasa Halida, Sartika, Dewi. Ed. 5*. Jakarta : Erlangga.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (EdisiKedua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2012. *TeoriPengembanganOrganisasi* . Jakarta. BumiAksara.
- Sutarto. 2006. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Ummam, Khaerul. 2012. *Manajemen Organisasi*. Bandung. Pustaka Setia

### **Dokumen Negara**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan Baik, Benar dan Penuh Rasa Tanggung Jawab.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau
- Renstra Diskominfo Riau 2015-2019

### **Skripsi:**

- Tambunan, Sondang Frinando. *Peran Camat sebagai Koordinator Pembangunan Di Kecamatan Kabun Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu*. Tidak Dipublikasikan. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

### **Jurnal:**

- Corry W,Andi. Etika Berkomunikasi dalam Penyampaian Aspirasi. Jurnal Komunikasi.